



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sudarman Nomor 1, Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118
Telepon (0331) 487066, Laman jemberkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GUSTIANI, S.STP.

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : ERVAN SETIAWAN, S.STP, MM.

Jabatan : Kepala Bagian Tata Pemerintahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Bagian Tata Pemerintahan

ERVAN SETIAWAN, S.STP, MM.
Pembina
NIP. 19841025 200312 1 003

Jember, 7 Januari 2025
Pihak Pertama
Analis Kebijakan Ahli Muda



GUSTIANI, S.STP
Penata Tingkat I
NIP. 19840810 200312 2 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	100 %
2	Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi umum yang terkelola	100 %
3	Peningkatan kualitas kerjasama daerah Kabupaten Jember	Jumlah konsultasi/koordinasi kerja sama daerah/administrasi pemerintahan yang difasilitasi/terlaksana	35 Kali
		Jumlah kegiatan analisa/reviu terhadap usulan kerjasama	35 Kali
		Jumlah rapat-rapat kerja sama/administrasi pemerintahan yang dilaksanakan	20 Kali
		Jumlah dokumen Nota Kesepakatan/ Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama yang difasilitasi	30 Dokumen
		Jumlah dokumen administrasi pemerintahan/kerja sama yang dihasilkan	50 Dokumen
		Jumlah kegiatan rutin asosiasi kepala daerah (APKASI) yang dilaksanakan	2 Kegiatan
		Jumlah dokumen administrasi pertanggungjawaban kerja sama daerah/ administrasi pemerintahan	50 Dokumen
		Jumlah dokumen anggaran kerja sama daerah/administrasi pemerintahan	1 Dokumen

Sub Kegiatan

	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA		Rp. 1.631.340.620
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp. 604.564.490
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 604.564.490
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp. 520.714.380
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Rp. 17.427.000
	- Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 60.651.380
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 442.636.000

	Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp. 214.120.000
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 214.120.000
	Penataan Organisasi		
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Dokumentasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp. 291.941.750
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Rp. 943.964.700
	Fasilitasi Kerjasama Daerah		Rp. 943.964.700
	- Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Rp. 943.964.700
	TOTAL		Rp. 2.575.305.320

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 44 Tahun 2023 KSOTK Sekda

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, melaksanakan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama serta tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan, otonomi daerah;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kwilayahan serta otonomi daerah;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan, otonomi daerah;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah; dan
- e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Tugas dan Wewenang tambahan sebagai PPTK

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

- a. Mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:
 1. Menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 2. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.

- b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:
1. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 2. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 3. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan

Pihak Kedua
Kepala Bagian Tata Pemerintahan



ERVAN SETIAWAN, S.STP, MM.
Pembina
NIP. 19841025 200312 1 003

Jember, 7 Januari 2025
Pihak Pertama
Analisis Kebijakan Ahli Muda



GUSTIANI, S.STP
Penata Tingkat I
NIP. 19840810 200312 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sudarman Nomor 1, Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118
Telepon (0331) 487066, Laman jemberkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ESTI PUJI SETYANI, SE. M.Si

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : ERVAN SETIAWAN, S.STP, MM.

Jabatan : Kepala Bagian Tata Pemerintahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Bagian Tata Pemerintahan

ERVAN SETIAWAN, S.STP.,MM.
Pembina
NIP. 19841025 200312 1 003

Jember, 7 Januari 2025

Pihak Pertama



ESTI PUJI SETYANI, SE. M.Si
Penata Tk. I
NIP. 19791018 200501 2 014

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	100 %
2	Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi umum yang terkelola	100 %
3	Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LKPJ, dan SPM yang Tersusun	3 Dokumen

	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA		Rp. 291.941.750
	Penataan Organisasi		Rp. 291.941.750
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Dokumentasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp. 291.941.750
	TOTAL		Rp. 291.941.750

Tugas dan Wewenang tambahan sebagai PPK Unit SKPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

- Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu;
- Menyiapkan SPM;
- Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
- Menyusun laporan keuangan SKPD

Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, PPK Unit SKPD juga mempunyai tugas lain meliputi:

- Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
- Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan
- Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM

Pihak Kedua
Kepala Bagian Tata Pemerintahan



ERVAN SETIAWAN, S.STP.,MM.
Pembina
NIP. 19841025 200312 1 003

Jember, 7 Januari 2025
Pihak Pertama
Analisis Kerjasama Lintas Sektor



ESTI PUJI SETYANI, SE. M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19791018 200501 2 014



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sudarman Nomor 1, Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118
Telepon (0331) 487066, Laman jemberkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AUDI RYAN SETIAWAN, S.STP

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Pertama

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : ERVAN SETIAWAN, S.STP, MM.

Jabatan : Kepala Bagian Tata Pemerintahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Bagian Tata Pemerintahan

ERVAN SETIAWAN, S.STP,MM.
Pembina
NIP. 19841025 200312 1 003

Jember, 7 Januari 2025
Pihak Pertama
Analis Kebijakan Ahli Pertama



D9AAKX737105022

AUDI RYAN SETIAWAN, S.STP
Penata Muda Tk. I
NIP. 19960923 201908 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	100 %
2.	Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100 %
3.	Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	100 %
4.	Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %
5.	Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah	Persentase administrasi Tata pemerintahan yang terfasilitasi	97,35%
		Jumlah kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja sesuai dengan pedoman	31 Kecamatan dan 22 Kelurahan
		Jumlah kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai dengan standar pelayanan	31 Kecamatan dan 22 Kelurahan
		Jumlah kecamatan dan kelurahan yang memiliki kinerja sesuai dengan pedoman	31 Kecamatan dan 22 Kelurahan
		Jumlah dokumen bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang administrasi kewilayahan	100 Dokumen
		Jumlah dokumen bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kewilayahan	100 Dokumen
		Jumlah wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah	31 Kecamatan dan 22 Kelurahan
		Jumlah pembakuan nama rupabumi yang terinventarisir	400 Objek Rupabumi
		Jumlah dokumen administrasi kewilayahan yang dihasilkan	200 Dokumen
		Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas	2 Dokumen

Sub Kegiatan

	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA		Rp. 1.294.021.643
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp. 17.083.740
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 4.911.570
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terpenuhinya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 6.432.170
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terpenuhinya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 5.740.000
	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terpenuhinya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp. 0
	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terpenuhinya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp. 0
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Rp. 4.377.924
	- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terpenuhinya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 0
	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terpenuhinya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 4.377.924
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		Rp. 103.344.641
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terpenuhinya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Rp. 103.344.641
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp. 48.250.000
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rp. 48.250.000
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Rp. 1.120.965.338
	Administrasi Tata Pemerintahan		Rp. 1.120.965.338
	- Penataan Administrasi Pemerintahan	Terpenuhinya Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp. 273.124.910
	- Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terpenuhinya Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp. 471.801.800
	TOTAL		Rp. 917.983.015

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 44 Tahun 2023 KSOTK Sekda

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, melaksanakan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama serta tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan, otonomi daerah;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kwilayahan serta otonomi daerah;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan, otonomi daerah;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah; dan
- e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Tugas dan Wewenang tambahan sebagai PPTK

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

- a. Mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:
 1. Menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 2. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.
- b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:
 1. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 2. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 3. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan

Pihak Kedua
Kepala Bagian Tata Pemerintahan



ERVAN SETIAWAN, S.STP,MM.
Pembina
NIP. 19841025 200312 1 003

Jember, 7 Januari 2025
Pihak Pertama
Analisis Kebijakan Ahli Pertama



AUDI RYAN SETIAWAN, S.STP
Penata Muda Tk. I
NIP. 19960923 201908 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sudarman Nomor 1, Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118
Telepon (0331) 487066, Laman jemberkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BENDAHARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HENI ROSIANTI, SE

Jabatan : Bendahara

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : ERVAN SETIAWAN, S.STP., MM.

Jabatan : Kepala Bagian Tata Pemerintahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Bagian Tata Pemerintahan

ERVAN SETIAWAN, S.STP., MM.
Pembina
NIP. 19841025 200312 1 003

Jember, 7 Januari 2025
Pihak Pertama
Bendahara



HENI ROSIANTI, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19780916 201001 2 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BENDAHARA**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi keuangan yang terkelola.	100 %
		Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-GU, SPP-LS dan SPP-TU.	100 %
		Menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran.	100 %
		Menerima dan menyimpan TU dari BUD.	100 %
		Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya.	100 %
		Menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	100 %
		Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran.	100 %
		Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	100 %
		Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.	100 %
		Melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.	100 %
		Memeriksa kas secara periodik.	100 %
		Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank.	100 %
		Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan	100 %
		Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan	100 %

Pihak Kedua
Kepala Bagian Tata Pemerintahan



ERVAN SETIAWAN, S.STP., MM.
Pembina
NIP. 19841025 200312 1 003

Jember, 7 Januari 2025
Pihak Pertama
Bendahara



HENI ROSIANTI, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19780916 201001 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sudarman Nomor 1, Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118
Telepon (0331) 487066, Laman jemberkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PENGUMPUL DATA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DIAN FAJARWATI

Jabatan : Pengumpul Data Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : ERVAN SETIAWAN, S.STP, MM.

Jabatan : Kepala Bagian Tata Pemerintahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Bagian Tata Pemerintahan

ERVAN SETIAWAN, S.STP,MM.
Pembina
NIP. 19841025 200312 1 003

Jember, 7 Januari 2025
Pihak Pertama
Pengumpul Data Penyelenggaraan
Otonomi Daerah



DIAN FAJARWATI
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19670925 198903 2 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADMINISTRASIAN UMUM**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan	Mengadministrasi Surat masuk dan keluar dengan benar	100%
		Mengarsip surat masuk dan surat keluar dengan tertata	100%
		Mendokumentasi kegiatan tata laksana dan pelayanan publik	100%
		Mengarsip surat dinas dan nota dinas terkait Tata Laksana dan Pelayanan Publik	100%
		Mengarsip dokumen notulensi rapat terkait Tata Laksana dan Pelayanan Publik	100%
		Mempersiapkan dokumen/ bahan materi/ paparan rapat dinas terkait Tata Laksana dan Pelayanan Publik	100%
		Mempersiapkan Laporan Data Barang Milik Daerah Bagian Tata Pemerintahan	100%
		Meningkatnya nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD)	Memproses dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD)
3	Meningkatnya nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Memproses dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM)	1 Dokumen
		Membuat dokumen di bidang otonomi daerah yang dihasilkan	100 Dokumen
		Membuat dokumen bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang otonomi daerah	100 Dokumen
		Membuat dokumen bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang otonomi daerah	100 Dokumen
		Membantu kegiatan fasilitasi kunjungan kerja	8 Kegiatan
		Membantu kegiatan fasilitasi otonomi daerah	2 Kegiatan

Tugas dan fungsi tambahan sebagai Pengurus Barang Persediaan Pembantu (Barang Pakai habis)/Aset Lancar:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

- a. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
- b. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang;
- c. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- d. melakukan *stock opname* barang persediaan

Pihak Kedua
Kepala Bagian Tata Pemerintahan



ERVAN SETIAWAN, S.STP,MM.
Pembina
NIP. 19841025 200312 1 003

Jember, 7 Januari 2025
Pihak Pertama
Pengumpul Data Penyelenggaraan
Otonomi Daerah



DIAN FAJARWATI
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19670925 198903 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sudarman Nomor 1, Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118
Telepon (0331) 487066, Laman jemberkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PENGADMINISTRASI UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRI UMI SUSIKI

Jabatan : Pengadministrasi Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : ERVAN SETIAWAN, S.STP, MM.

Jabatan : Kepala Bagian Tata Pemerintahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Bagian Tata Pemerintahan

ERVAN SETIAWAN, S.STP,MM.
Pembina
NIP. 19841025 200312 1 003

Jember, 7 Januari 2025
Pihak Pertama
Pengadministrasian Umum



SRI UMI SUSIKI
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19680413 199003 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI UMUM**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah Kabupaten Jember	Mengelola data Sinergitas Kecamatan	31 Kecamatan
		Membuat dokumen administrasi pemerintahan yang dihasilkan	250 Dokumen
		Menyiapkan dan melaporkan bahan rapat koordinasi Camat dan Badan, Dinas, Bagian	12 Kegiatan
		Melaksanakan pengelolaan data aparatur pemerintahan, kelurahan, dan kecamatan	31 Kecamatan dan 22 Kelurahan
		Membantu kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Kelurahan dan Kecamatan	10 Kegiatan
		Membantu pembuatan SPJ	100 Dokumen
		Membantu pembuatan undangan kegiatan	100 Dokumen

Tugas dan fungsi tambahan sebagai Pengurus Barang Pembantu Inventaris/Aset Tetap

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

- a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
- d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
- e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
- g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
- j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang;
- k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- l. membuat Kartu Inventaris Ruang (KIR) semesteran dan tahunan;
- m. memberi label barang milik daerah;
- n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik barang;
- o. melakukan *stock opname* barang persediaan;

- p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

Pihak Kedua
Kepala Bagian Tata Pemerintahan



ERVAN SETIAWAN, S.STP.MM.
Pembina
NIP. 19841025 200312 1 003

Jember, 7 Januari 2025
Pihak Pertama
Pengadministrasi Umum



SRI UMI SUSIKI
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19680413 19903 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sudarman Nomor 1, Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118
Telepon (0331) 487066, Laman jemberkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Joni Pelita Kurniawansah, M.Si.

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ervan Setiawan, S.STP, MM.

Jabatan : Kepala Bagian Tata Pemerintahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Bagian Tata Pemerintahan

Ervan Setiawan, S.STP,MM.
Pembina
NIP. 19841025 200312 1 003

Jember, 22 Januari 2025
Pihak Pertama
Penelaah Teknis Kebijakan

135AMX070891240
Drs. Joni Pelita Kurniawansah, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 196901231990031004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerja sama daerah	Mereviu dan menganalisa usulan dokumen kerja sama	35 dokumen
		Menyusun draft dokumen kerja sama	35 dokumen
		Membuat konsep nota dinas laporan penyusunan dokumen kerja sama dan administrasi pemerintahan	30 laporan
		Membuat konsep surat undangan rapat Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD)	20 kegiatan
		Membuat konsep Berita Acara hasil rapat TKKSD	20 kegiatan
		Membantu fasilitasi kegiatan penandatanganan MoU secara seremonial	6 kegiatan
		Membuat konsep surat dinas di bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama	12 surat
		Membantu persiapan kegiatan Rakerwil Apkasi dan AOE	2 kegiatan
		Membuat usulan RKA bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama	1 kegiatan
		Menyusun dokumen administrasi pertanggungjawaban bidang keuangan bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama.	2 kegiatan
		Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.	12 kegiatan

Pihak Kedua
Kepala Bagian Tata Pemerintahan



Ervan Setiawan, S.STP,MM.
Pembina
NIP. 19841025 200312 1 003

Jember, 22 Januari 2025
Pihak Pertama
Penelaah Teknis Kebijakan



Drs. Joni Pelita Kurniawansah, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19690123 199003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sudarman Nomor 1, Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118
Telepon (0331) 487066, Laman jemberkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PENATA KELOLA PEMERINTAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YOHANES NATALIUS ZALUKHU, S.Tr.I.P

Jabatan : Penata Kelola Pemerintahan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : ERVAN SETIAWAN, S.STP, MM.

Jabatan : Kepala Bagian Tata Pemerintahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Bagian Tata Pemerintahan

ERVAN SETIAWAN, S.STP,MM.
Pembina
NIP. 19841025 200312 1 003

Jember, 7 Januari 2025
Pihak Pertama
Penata Kelola Pemerintahan



FFAKX380135225

YOHANES NATALIUS ZALUKHU, S.Tr.I.P
Penata Muda
NIP. 200112082024091001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENATA KELOLA PEMERINTAHAN**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja sesuai dengan pedoman	31 Kecamatan dan 22 Kelurahan
		Jumlah kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai dengan standar pelayanan	31 Kecamatan dan 22 Kelurahan
		Jumlah kecamatan dan kelurahan yang memiliki kinerja sesuai dengan pedoman	31 Kecamatan dan 22 Kelurahan
		Jumlah dokumen bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang administrasi kewilayahan	100 Dokumen
		Jumlah dokumen bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kewilayahan	100 Dokumen
		Jumlah wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah	31 Kecamatan dan 22 Kelurahan
		Jumlah pembakuan nama rupabumi yang terinventarisir	400 Objek Rupabumi
		Jumlah dokumen administrasi kewilayahan yang dihasilkan	100 Dokumen
		Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas	2 Dokumen

Pihak Kedua
Kepala Bagian Tata Pemerintahan



ERVAN SETIAWAN, S.STP,MM.
Pembina
NIP. 19841025 200312 1 003

Jember, 7 Januari 2025
Pihak Pertama
Penata Kelola Pemerintahan



YOHANES NATALIUS ZALUKHU, S.Tr.I.P
Penata Muda
NIP. 200112082024091001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sudarman Nomor 1, Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118
Telepon (0331) 487066, Laman jemberkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AJI CENDIKA SIWI, S.Kom.

Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : ERVAN SETIAWAN, S.STP, MM.

Jabatan : Kepala Bagian Tata Pemerintahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Bagian Tata Pemerintahan

ERVAN SETIAWAN, S.STP, MM.
Pembina
NIP. 19841025 200312 1 003

Jember, 7 Januari 2025
Pihak Pertama
Pranata Komputer Ahli Pertama



AJI CENDIKA SIWI, S.Kom.
NIP. 199909232024211003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Kualitas Kerja Sama Daerah	Terlaksananya pengelolaan sistem informasi kerjasama	Aplikasi terkelola dengan baik
2.	Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi.	Infrastruktur Teknologi Informasi terpelihara dengan baik
	Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengelolaan sistem informasi terkait Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah/ Standar Pelayanan Minimal/ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	Aplikasi terkelola dengan baik

Pihak Kedua
Kepala Bagian Tata Pemerintahan



ERVAN SETIAWAN, S.STP,MM.
Pembina
NIP. 19841025 200312 1 003

Jember, 7 Januari 2025
Pihak Pertama
Pranata Komputer Ahli Pertama



AJI CENDIKA SIWI, S.Kom.
NIP. 199909232024211003